

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budiman, M. (2020). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia* . Bandung: Setara Press.

Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Pertama)* . Bandung: Setara Press.

Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* . Bandung: PT Refika Aditama.

Djaja, E. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asep Dedi Suwasta., S. M. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV. Agung Ilmu.

Kristian, & Gunawan, Y. (2015). *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Maidin Gultom, S. M. (2018). *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Medan: Nurul Falah Atif.

Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014)

N.Wardiningsih, *Hukum dan Peradilan*, CV Pamularsih, Jakarta, 2009

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2006

Muhammad Erwin dan Firman F, B. *Pengantar Ilmu Hukum*, Reflika Aditama, Bandung, 2016

Dzulkifri Umar dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Graha Media Press, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

- Budiman, M. (2016). Problematika Penerapan Pasal 2 Dan 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2013.Jurnal Yudisial, 9 No.3*), 303-315.
- Budiman, M. (2020). Penerapan Pasal 5 (1) Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . (*kajian Putusan Nomor 199/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ddg. Jurnal Yudisial, 13 No.1 Ap, 73-87*).
- Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian aset (asset Recovery) Sebagai alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120-132...
- Tampubolon, S. M. (2014). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 138-146.
- Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental* , 493-501